

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS
DESA MEMBANGUN (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI KAMPAR, RIAU)**

Oleh :Ahmad Gozali Fathurrahman Ashari

ahmadgozalif@gmail.com

Pembimbing : Sujianto

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

An effort to support the disadvantaged village reduction program that entered the agenda of RPJMN 2015-2019 is to maximize the potential of the village owned. The central government makes the village index build (IDM) in the form of ministerial regulation of village, disadvantaged regional development and transmigration number 2 year 2016 which is used to measure the country's independence direction with three main indicators, namely social, economic, and environment. Gunung Sari Village Kampar District which is a self-contained village in Riau province. With the status of Independent village, Gunung Sari Village government and village community can not implement the IDM with maximum. The purpose of this research is to know how the IDM implementation in Gunung Sari Village Kampar District. The theory used is the Smith theory which is the implementation theory of the bottom up model with four indicators: idealized policy, Target GRUOP, implementing organization, and Enviromental factor as well as three indicators of IDM, Social Security Index, economic endurance index, and environmental resilience index. This method of study is to use a qualitative method with a case study approach. The results of this research show that: first, implentation regulation of the village minister about the village Building Index (IDM) in Gunung Sari village is still not optimal. Secondly, the factors that inhibit the implementation of ministerial regulation on Village Index Building (IDM) in Gunung Sari village, namely, incomplete education facility, lack of access to clean water and landfills, and absence of the country's flagship product as a source of income that can reach the economy of village community. The advice in this research should be that village governments can focus more on Community empowerment programs.

Keywords: *Village Development Index, Public Policy, Implementation*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan desa masing-masing. Hal ini, desa memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desanya dengan peraturan yang dibuat desa, pembangunan, pelayanan, dan fasilitas yang dimiliki desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa mengembangkan potensi yang ada di desa dengan bantuan APBDes dan BUM-Des (Badan Usaha Milik Desa) untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti modal social, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. Pengelolaan APBDes serta BUM-Des yang baik, pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian desa ataupun perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik yang mencerminkan kemandirian, kerjasama, dan kebersamaan. Saat ini Desa Gunung Sari telah mengelola APBDes dan BUM-Des nya dengan baik sehingga menjadikan desanya sebagai lingkungan yang mandiri.

Membangun suatu desa dibutuhkan acuan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dan mengembangkan potensi-potensi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat acuan tersebut yang di sebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah parameter yang digunakan pemerintah dalam menentukan arah kemandirian suatu desa. Terdapat tiga komponen penilaian dalam IDM ini, yaitu :

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Penyusunan ketiga dimensi dalam IDM dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

IDM ini disusun pemerintah sebagai upaya pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Tujuan dari disusunnya IDM menurut Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2016 yaitu :

- a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan
- b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.

Terdapat klasifikasi desa menurut status kemajuan dan kemandirian desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016, yaitu :

- a. Desa Mandiri atau yang di sebut Desa Sembada. Desa ini memiliki IDM lebih besar dari ($>$) 0,8155.
- b. Desa Maju atau disebut Desa Pra-Sembada. Desa ini memiliki IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya. Desa ini memiliki IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya. Desa ini memiliki IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama memiliki IDM kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014 saat IDM sedang di sosialisasikan, masih menjadi desa tertinggal berdasarkan IDM dengan nilai 0.5493. Dan pada tahun 2018 Desa Gunung Sari telah menjadi desa mandiri dengan nilai 0.8847. Dalam RPJMDes yang dibuat Desa Gunung Sari sejak tahun 2016 mengarah kepada pembangunan fasilitas publik yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Usaha pembangunan tersebut berdasar pada indikator-indikator IDM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT. Selain itu, Desa Gunung Sari juga menggunakan anggaran desanya untuk pemberdayaan masyarakatnya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Penelitian ini difokuskan pada indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan.

Pada penelitian ini, potensi yang akan dilihat adalah bagaimana Implementasi Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari sehingga dapat menjadi desa mandiri pada tahun 2018 karena pada tahun tersebut masih banyaknya terdapat kekurangan pada Desa Gunung Sari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2016 Tentang IDM di Desa Gunung Sari, Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tentang IDM di Desa Gunung Sari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi mengenai IDM di Desa Gunung Sari Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 tentang IDM di Gunung Sari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada bidang Kebijakan Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan agar program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat lebih maksimal untuk masa yang akan datang.

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan Publik

(Winarno, 2016) istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda, namun kebijakan merupakan definisi yang menekankan tidak

hanya pada yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut **William N. Dunn** dalam (**Pasolong, 2014**) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut (**Nugroho, 2017**) kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategis, maka didalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat didalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga bersifat negatif, didalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Kemudian menurut **Anderson** dalam (**Indiahono, 2017**) mendefenisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. **Kilpatrick** dalam (**Asra, 2014**) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.

Menurut **W.I. Jenkins** dalam (**Wahab, 2014**) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Berbeda pendapat dengan **Lemieux** dalam (**Wahab, 2014**) merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Menurut (**Abidin, 2016**) kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Dan **Thomas R Dye** dalam (**Nugroho, 2017**) Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Pandangan lain juga dikemukakan oleh **Bridgmen** dan **Davis** dalam (**Suharto, 2015**) mengatakan bahwa kebijakan publik “whatever government choose to do or not to do”, artinya kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

2.2 Implementasi Kebijakan

(**Winarno, 2014**) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sedangkan **Van meter** dan **Van Horn** dalam (**Winarno, 2016**) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan secara sederhana menurut (Agustino, 2016) dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Grindle dalam (Winarno, 2016) yang menurut pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkbage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Kemudian menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

(Purwanto & Sulistyastuti, 2015) menyatakan implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok. Dan menurut Mazmanian dan Sebastier dalam (Wahab, 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Smith dalam (Mulyadi, 2016) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. *Idelized Policy*, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. *Target groups*, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Enviromental factors*, unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan peneliti yang ditemukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti megembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih.

3.1 Lokasi Penelitian

Karena keterbatasan peneliti, Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dengan mengacu pada IDM yang telah disusun dalam Peraturan Menteri

Desa PDTT No. 2 Tahun 2016.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Dimana peneliti menentukan yang menjadi informan yaitu orang yang mewakili karakteristik populasi untuk memperoleh data untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Ada pun informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
2. Pendamping Kecamatan Gunung Sahilan
3. Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
4. Masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Studi Pada Desa Gunung Sari Kabupaten Kampar Riau. Data yang peneliti peroleh tersebut telah peneliti sajikan pada BAB V yaitu pembahasan dan hasil sebagai penunjang untuk penelitian ini. Adapun data primer ini peneliti peroleh dari delapan informan yang langsung peneliti wawancarai secara langsung. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah berbentuk naskah tertulis atau

dokumen, buku-buku, dan penelitian terdahulu (jurnal). Yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah:

1. UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. RPJMN 2015-2019
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
4. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
5. Profil Kecamatan Gunung Sahilan
6. Profil Desa Gunung Sari

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang di perlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara penelitian dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan informan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang Indeks Desa Membangun. Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan di teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Hal ini berkaitan dengan Indeks Desa Membangun serta kondisi desa yang berguna untuk mencari data sekunder dan primer. Dokumentasi yang peneliti sajikan ada pada lampiran dan peneliti dapat pada saat penelitian berlangsung.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendapat Creswell sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam hal ini peneliti sudah mendapatkan data dari DPMD Kampar, Pendamping Desa tingkat kecamatan, Kepala Desa Gunung Sari, dan masyarakat desa yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari, dan tahap ini juga mempermudah peneliti dalam menganalisis data.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini peneliti mencoba mendalami data dengan memahami kedalaman makna berdasarkan hasil wawancara dengan informen terkait yaitu DPMD Kampar, Pendamping Desa tingkat kecamatan, Kepala Desa Gunung Sari, dan masyarakat desa.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam langkah ini peneliti membuat kategori-kategori dari data yang telah diterima melalui informen terkait Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh informen penelitian.
4. Tahapan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam laporan kualitatif tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Dalam langkah akhir ini, peneliti berharap agar bisa menjawab mengenai tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui bagaimanakan implementasi mengenai IDM di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari

4.1.1 Indeks Ketahanan Sosial

Untuk melihat Implementasi Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari pada indikator indeks ketahanan sosial ada 4 dimensi yaitu: modal sosial, kesehatan, pendidikan, serta permukiman. Fakta yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara pada dimensi modal sosial dan kesehatan sudah baik. Desa Gunung Sari sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai kemudian Desa Gunung Sari juga memiliki kegiatan sosial yang aktif sehingga dalam dimensi ini mendapatkan nilai yang baik. Dalam dua dimensi tersebut Desa Gunung Sari sudah dapat memenuhi kriteria yang terdapat dalam Indeks Desa Membangun yang dibuat oleh Kementerian Desa,

Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Akan tetapi dalam dimensi pendidikan, Desa Gunung Sari masih belum dapat melihat beberapa poin penting yaitu tidak adanya fasilitas kursus atau kegiatan belajar keterampilan khusus yang seharusnya dapat meningkatkan keahlian masyarakat dibidang tertentu. Pada dimensi pendidikan Desa Gunung Sari adanya tempat kursus akan menjadi fasilitas yang sangat penting mengingat dalam kegiatan bermasyarakat ilmu yang digunakan bukan hanya dari sekolah, masyarakat juga membutuhkan keterampilan lainnya yang seharusnya dapat difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian dalam dimensi permukiman Desa Gunung Sari juga melewati poin penting yaitu tidak adanya fasilitas air minum atau (PDAM) sehingga masyarakat desa masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari seperti untuk minum, mencuci dan kegiatan lainnya. Selain itu Desa Gunung Sari masih belum memiliki tempat pembuangan sampah atau pengolahan sampah, yang dimana saat ini masyarakat desa masih harus membakar sampah di halaman rumah yang kurang baik terhadap lingkungan dan kesehatan.

4.1.2 Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks ketahanan ekonomi hanya memiliki satu dimensi yaitu dimensi ekonomi. Perekonomian di Desa Gunung Sari sudah berjalan dengan baik dimana Desa Gunung Sari memiliki pasar sebagai pusat perekonomian, terdapat perbankan, dan koperasi yang dimana hal tersebut terdapat menunjang kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Desa Gunung Sari masih belum memiliki produk unggulan yang seharusnya dimiliki. Desa Gunung Sari memiliki banyak potensi sumberdaya yang seharusnya dapat dijadikan salah satu produk unggulan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pada saat ini mayoritas masyarakat Desa Gunung Sari masih bergantung dengan hasil perkebunan sawit yang dimana seharusnya dengan

potensi yang dimiliki Desa Gunung Sari dapat membuat satu produk yang dapat di kelola oleh masyarakat dan masyarakat nantinya dapat membuka peluang usahanya dari potensi tersebut.

4.1.3 Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks ketahanan lingkungan memiliki satu dimensi yaitu dimensi ekologi yang dimana pada dimensi ini mencakup kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana. Desa Gunung Sari sampai saat ini masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari yang berarti kualitas air di Desa Gunung Sari masih tergolong baik. Air sungai di Desa Gunung Sari tidak terdapat limbah ataupun tidak tercemar oleh limbah. Kemudian kualitas tanah dan udara juga masih tergolong baik yang dimana tanah di Desa Gunung Sari masih tergolong subur karena terdapat banyak perkebunan sawit yang membuktikan bahwa kualitas tanah di Desa Gunung Sari baik. Kemudian pada potensi rawan bencana, Desa Gunung Sari memiliki kontur yang tidak rata atau berbukit. Berdasarkan fakta lapangan bahwa Desa Gunung Sari belum pernah mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Hal ini juga membuat nilai IDM pada indikator ini tinggi.

5.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Indeks Desa Membangun di Desa Gunung Sari

5.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu dan penting bagi pengembangan wawasan dan pengembangan pengambilan keputusan dan kreatifitas siswa. Hal tersebut dapat berdampak kepada sikap seseorang dalam mengambil keputusan. Apabila masyarakat desa memiliki wawasan dan keterampilan yang kurang maka disaat seseorang tersebut mengambil peran aktif di

masyarakat belum dapat menentukan sikap terhadap suatu masalah atau membuat suatu terobosan yang dapat menguntungkan banyak orang. Desa Gunung Sari yang tidak memiliki fasilitas kursus dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Selain tempat keterampilan khusus atau kursus dan adanya SMK dapat meningkatkan dan memfokuskan pelajar kepada bidang yang ingin mereka tekuni sehingga pelajar tersebut memiliki keterampilan yang memadai di bidangnya. Hal ini berdampak kepada pengembangan kreatifitas masyarakat dalam membuat produk yang dapat dijadikan sebagai sumber kebutuhan sehari-hari dan bahkan dapat dijadikan sumber penghasilan tetap.

5.2.2 Permukiman

Keadaan permukiman yang ideal menurut Indeks Desa Membangun (IDM) harus memiliki akses informasi dan komunikasi yang baik, akses listrik, sanitasi atau tempat pembuangan, serta akses air bersih dan air minum. Masyarakat desa Gunung Sari masih memiliki ketergantungan pada air sungai yang kebersihannya masih tidak lebih baik dari air sumur bor yang ada di setiap rumah ataupun air pdam. Air sungai di Desa Gunung Sari walaupun tidak ada pencemaran air tapi masih digunakan untuk banyak kegiatan seperti mencuci baju di sungai pembuangan limbah air rumahan dan lain-lain yang membuat air sungai menjadi kurang bersih dari air sumur bor pribadi. Selain desa gunung sari belum memiliki tempat pembuangan sampah yang berdampak pada masyarakat yang membakar sampah dirumahnya.

5.2.3 Keberagaman Produk Masyarakat

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) merupakan ukuran perhitungan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakupi bidang perekonomian suatu desa

seperti produksi masyarakat desa, adanya pusat perdagangan, adanya lembaga keuangan dan perkreditan, adanya koperasi, akses logistik dan keterbukaan wilayah atau adanya moda transportasi. Kegiatan perekonomian di Desa Gunung Sari tidaklah buruk bahkan kegiatan perekonomian di sana terbilang berjalan dengan baik tetapi terdapat beberapa poin penting yang belum terdapat di Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari menginginkan adanya lokasi agroteknologi sebagai mata pencaharian masyarakat selain kelapa sawit, sehingga kedepannya masyarakat tidak berikat dengan hanya kelapa sawit dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Selain itu dengan adanya agroteknologi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pendapatan asli desa. Tetapi kendala dalam rencana yang diinginkan oleh Kepala Desa Gunung Sari yaitu tidak adanya lahan yang digunakan yang merupakan rata-rata lahan sudah menjadi hak milik masyarakat dan kebanyakan lahan digunakan sebagai kebun sawit.

Desa Gunung Sari juga memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat yang bersifat jangka panjang seperti bank sampah, dan pengadaan bibit buah-buahan yang diharapkan dapat dijadikan ikon Desa Gunung Sari dan menjadi hasil produksi BUMDes. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan seharusnya dapat meningkatkan keanekaragaman produksi masyarakat desa yang menjadi salah satu penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM). Dilihat dari potensi lingkungan seharusnya desa gunung sari masih dapat membuat beberapa produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab V sebelumnya, maka penelitian terkait Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Indeks Desa Membangun (IDM) masih belum optimal karena walaupun status kemandirian Desa Gunung Sari sudah mendapatkan sttus mandiri tetapi dalam prosesnya masih terdapat kendala dalam membangun desanya yang berdasarkan tiga indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Gunung Sari dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dalam penilaiannya sudah sangat baik, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya terdapat dua poin penting yang terlewat sehingga status mandiri yang saat ini di sandang oleh Desa Gunung Sari menjadi kurang optimal. Dalam hal ini Desa Gunung Sari masih tidak memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap seperti tempat kursus sehingga dapat menghambat perkembangan masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan khusus di bidang tertentu. Selain itu juga pada dimensi permukiman masyarakat Desa Gunung Sari masih mengandalkan air sungai didalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan air minum.
- b. Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), secara umum kegiatan perekonomian di Desa Gunung Sari sudah baik tetapi memang belum optimal. Desa Gunung Sari sudah memiliki

pusat perdagangan dan pertokoan atau pasar sehingga roda perekonomian bisa terus berputar. Selain itu Desa Gunung Sari juga terdapat perbankan dan fasilitas perkreditan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, akses menuju desa yang bagus dan terdapat moda transportasi sehingga mempermudah akses keluar masuk desa. Akan tetapi Dari segi keberagaman produk masyarakat desa masih kurang yang dimana jika dilihat dari potensi desa seharusnya Desa Gunung Sari masih dapat membuat beberapa produk unggulan, selain itu keberadaan akses pengiriman logistik juga menjadi penghambat perkembangan desa di zaman digital ini.

- c. Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), pada indikator ini Desa Gunung Sari sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat kualitas lingkungan yang dimiliki Desa Gunung Sari seperti kualitas air sungai yang masih baik tanpa ada pencemaran serta air sungai yang masih digunakan oleh masyarakat membuktikan bahwa kualitas air masih baik, kemudian kualitas tanah dan udara juga masih baik tanpa pencemaran. Kemudian dalam potensi bencana alam, memang dalam segi potensi Desa Gunung Sari masih memiliki potensi tanah longsong dan kebakaran hutan akan tetapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya peringatan dan adanya perlengkapan keselamatan yang dimiliki.

2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Gunung Sari yaitu *pertama* terdapat pada dimensi pendidikan yang dimana Desa Gunung Sari masih belum memiliki fasilitas

pendidikan yang lengkap khususnya tidak adanya tempat belajar keterampilan khusus atau kursus, *kedua* didalam dimensi permukiman masyarakat Desa Gunung Sari masih menggunakan air sungai sebagai kebutuhan air bersih sehari-hari yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah, *ketiga* dalam keragaman produk masyarakat desa yang terdapat pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKS) yang dimana masyarakat masih terfokus dengan perkebunan sawit yang seharusnya masyarakat masih bisa untuk membuat produk lain yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Dengan status mandiri yang dimiliki Desa Gunung Sari, diharapkan dalam perencanaan anggaran bisa lebih di fokuskan kepada pemberdayaan masyarakatnya agar peningkatan kapasitas masyarakat bisa lebih cepat dan lebih efektif, kemudian masyarakat dapat berkembang dan dapat bisa menjadi lebih mandiri sesuai dengan keinginan desa.
2. Sebaiknya desa membuat program-program yang dapat melatih keterampilan khusus dalam bidang-bidang yang banyak diinginkan oleh masyarakat yang bersifat produktif. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat dan masyarakat secara jangka panjang dapat membuat suatu produk yang dapat di perjual belikan kepada

masyarakat luas.

3. Sebaiknya pemerintah desa dapat memberikan pemahaman mengenai air yang baik dan berbahaya bagi kesehatan, karena masyarakat desa masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemerintah desa juga seharusnya dapat menyediakan PDAM yang terdapat penyulingan terlebih dahulu sehingga masyarakat dapat menggunakan air yang lebih layak untuk di konsumsi.
4. Pemerintah Desa Gunung Sari diharapkan agar dapat lebih mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya mengembangkan potensi desanya yang lain agar tidak terfokus terhadap perkebunan sawit serta dapat menjadikan potensi baru tersebut sebagai sumber penghasilan desa dan masyarakat dalam jangka panjang baik dalam bentuk sosialisasi, maupun seminar kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Asra, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: IN MEDIA.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- John W. Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Implementasi*

- Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Rudy & E. Ariyanto, Eds.). Yogyakarta: Gava Media.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

- Apriani, Dwita Kadek & Irhamna. (2016). Respon publik terhadap model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa: studi tiga provinsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*. 13 (2) : 137-148.
- Aziz, Latifah L. Nyimas. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13 (2) : 193-211.
- Marsono. (2017). Membangun model pelayanan publik desa: mendekatkan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Borneo Administrator*. 13 (1) : 1-20.
- Maulana, Yusuf. (2017). Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*. 13 (2) : 261-268.
- Nurjaman, Rusman & Prasetyo, Galih Antonius. (2018). Desa dalam administrasi publik Indonesia kontemporer: penguatan peran LAN. *Jurnal Borneo Administrator*. 14 (1) : 35-52.

Dokumen:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Website:

- <https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-des> diakses pada 10 Februari 2018 Pukul 23:30 WIB